Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah

MENARA *Ilmu***DAFTAR ISI**

☐ Dinamika Kelembagaan Penguasaan Lahan Komunal pada Sistem Agroforestri : Studi Kasus di Tiga Nagari di Sumatera Barat oleh Tri Martia, dkk.	1
☐ Theoretical Analysis of Preloaded Bolten Joints Subjected to Cyclic Loading oleh Trisna Putra	9
☐ Tinjauan Efisiensi Pengeringan Jahe Menggunakan Sistem Pengering Pompa Panas oleh Ismet Eka Putra dan M. Yahya.	17
☐ Pengaruh Temperatur Rendah Terhadap Ketangguhan Baja oleh Hendriwan Fahmi	26
☐ Reaksi Penangkapan Energi dan Reaksi Fiksasi Carbon sebagai Istilah Alternatif Pengganti Reaksi Gelap dan Terang dalam Proses Fotosintesis oleh Sularno	42
☐ Pengaruh Gerak Makan dan Kedalaman Potong Proses Sekrap (Shaping) Datar Baja Tahan Aus (Wear Resistant) Terhadap Laju Keausan Tepi Pahat HSS oleh Asfarizal	47
☐ Karakteristik Serbuk Baja ASSAB 760 Hasil Alat Atomisasi Sentrifugal Tipe Elektroda Berputar oleh Nurzal.	59
☐ Analisa Termodinamika Siklus Brayton dengan Regenerasi pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Menggunakan Data Operasional PLTG Pauh V Padang oleh Asmara Yanto	66
☐ Reformasi Peradilan dan Pemberantasan Korupsi oleh H. Huhardi Rajab	78
☐ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Berkelanjutan oleh Wedy Nasrul	90
☐ Konsep Pendidikan Islam dalam Menaggulangi Prilaku Menyimpang di Kalangan Remaja oleh Zuhasni Hasan	99

DAFTAR ISI

□ Dinamika Kelembagaan Pengusaan Lahan Komunal pada Sistem Agroforestri : Studi Kasus di Tiga Nagari di Sumatera Barat oleh Tri Martial, dkk.	1
□ Theoretical Analysis of Preloaded Bolten Joints Subjected to Cyclic Loading oleh Trisna Putra	9
□ Tinjauan Efisiensi Pengeringan Jahe Menggunakan Sistem Pengering Pompa Panas oleh Ismet Eka Putra dan M. Yahya.	17
□ Pengaruh Temperatur Rendah Terhadap Ketangguhan Baja oleh Hendriwan Fahmi	26
□ Reaksi Penangkapan Energi dan Reaksi Fiksasi Carbon sebagai Istilah Alternatif Pengganti Reaksi Gelap dan Terang dalam Proses Fotosintesis oleh Sularno	42
□ Pengaruh Gerak Makan dan Kedalaman Potong Proses Sekrap (Shaping) Datar Baja Tahan Aus (Wear Resistant) Terhadap Laju Keausan Tepi Pahat HSS oleh Asfarizal	47
□ Karakteristik Serbuk Baja ASSAB 760 Hasil Alat Atomisasi Sentrifugal Tipe Elektroda Berputar oleh Nurzal.	59
□ Analisa Termodinamika Siklus Brayton dengan Regenerasi pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Menggunakan Data Operasional PLTG Pauh V Padang oleh Asmara Yanto	66
□ Reformasi Peradilan dan Pemberantasan Korupsi oleh H. Huhardi Rajab	78
□ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Berkelanjutan oleh Wedy Nasrul	90
□ Konsep Pendidikan Islam dalam Menaggulangi Prilaku Menyimpang di Kalangan Remaja oleh Zuhasni Hasan	99

MENARA Ilmu

Penerbit

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB)

Pelindung

Dr. H. Shofwan Karim Elha, MA (Rektor)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi

Drs. Mafardi, M.Pd

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMSB

Dewan Redaksi/Penyunting Pelaksana

Miswardi, SH, M.Hum

Ir. Misdar Putra, MT

Ir. Refdi, M.Si

Drs. Mursal, M.Ag

Lelisuwita, SE, MM

My Syahrawati, SP, M.Si

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Chatlinas Said

Prof. Dr. Anwar Kasim

Prof. Dr. Nasrun Harun, MA

Prof. Dr. Syamsul Amar, MS

Ir. Dahnul Zainuddin, M.Sc

Ds. H. Shofwan Karim Elha, MA

Drs. Mafardi, M.Pd

Pelaksana Tata Usaha

Wedy Nasrul, SE

Alamat Redaksi

Kantor LPPM UMSB Jl. Pasir Kandang 4, Padang 25172

Telp. (0752) 481645 Email : umsb@telkom.net

MENARA ILMU, merupakan Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah yang diterbitkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang terbit 2 (dua) kali dalam setahun. Penyunting menerima kiriman naskah hasil kajian dan penelitian untuk bidang eksakta, pendidikan/sosial dan agama islam untuk dipublikasikan di jurnal ini. Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud. Syarat-syarat dan cara penulisan tulisan dapat dilihat pada halaman belakang.

DINAMIKA KELEMBAGAAN PENGUASAAN LAHAN KOMUNAL PADA SISTEM AGROFORESTRI : STUDI KASUS DI TIGA NAGARI DI SUMATERA BARAT

Oleh

Tri Martial¹, Helmi², Nursyirwan Effendi² dan Endry Martius²

¹ Staf Pengajar F.Pertanian UISU Medan,

² Staf Pengajar Pascasarjana Unand, Padang

ABSTRACT

Agroforestry as a people base forest management commonly not well developed and almost in a traditional management. The most problem in West Sumatera concern to land tenure status as communal property (ulayat land). The need of clearly land tenure mechanism will support this system for sustainable land use. The less security of land tenure do not affect to agroforestry performance, but the management of land use is more important to that effect.

Key Words: Agroforestry, land tenure mechanism, land use

PENDAHULUAN

Selama ini kebijakan pengelolaan hutan oleh pemerintah menjadikan hutan sebagai sumber devisa. Akibatnya ekstraksi hutan lebih dipentingkan oleh perusahaan-perusahaan besar pemerintah atau swasta. Sedang pengelolaan tradisional oleh masyarakat hutan terpinggirkan dan masyarakat sekitar hutan dianggap sebagai agen perusak hutan. Sehingga sering menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah dan pemegang hak pengusahaan hutan.

Konflik pengelolaan hutan terutama bersumber kepada persepsi ketidakadilan oleh masyarakat sekitar hutan dimana akses mereka terhadap sumber daya hutan dan lahan dilarang. Dimana lahan yang diakui sebagai hutan negara sering tumpang tindih dengan lahan masyarakat. Di Sumatera Barat umumnya lahan berhutan (*parak*) merupakan lahan *ulayat* dan tidak bersertifikat. Akibatnya program-program reboisasi hutan dan lahan sering gagal. Oleh sebab itu Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal menjadi kata kunci dalam membangun sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan ini, sebab hal ini memberi rasa aman terhadap dugaan siapa yang mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukan.

Hak-hak masyarakat lokal berbasis pada *property right* (hak kepemilikan) sebagai institusi dalam sistem aturan (*role in use*). Di Indonesia *property right* berada dalam pengaturan yang sering tumpang tindih dalam aturan formal dan informal. Kepemilikan lahan sebagai bentuk *property right* merupakan permasalahan yang kompleks. Umumnya tanah-tanah tidak memiliki kejelasan status, sebab negara selain mengakui hak-hak kepemilikan sesuai dengan UUPA 1960 juga mengakui keberadaan hak *ulayat* (kepemilikan melalui lembaga adat). Akibatnya status penguasaan lahan juga beragam yang cenderung berubah.

Agroforestri sebagai salah satu model pemanfaatan lahan lestari, di Sumatera Barat umumnya ditemui pada lahan-lahan masyarakat khususnya pada lahan kering dalam bentuk ladang atau kebun. Agroforestri banyak dipromosikan sebagai sistem

land use yang tepat untuk mengatasi masalah kerusakan hutan dengan melakukan penanaman pohon pada lahan pertanian, serta mampu meningkatkan pendapatan petani dan akhirnya mengurangi intensitas tekanan pada hutan (Segura-Bonilla, 1997; Unruh, 2001; Place dan Otsuka, 1997; Dias, 2003).

Secara teoritis keberlanjutan agroforestri ini sangat dipengaruhi oleh status hak-hak penguasaan pada lahan, dimana jika diprediksi aman dalam penguasaan lahan dan produk di atasnya, maka investasi ke lahan diharapkan optimal. Oleh sebab itu dalam penelitian ini ingin dikemukakan bagaimana mekanisme kelembagaan penguasaan lahan pada sistem agroforestri ini sehingga mampu mendukung kebijakan pembangunannya.

AREAL STUDI DAN METODOLOGI

Penelitian dilakukan di Sumatera Barat. Lokasi penelitian adalah areal *parak* yang merupakan integrasi pohon dan tanaman pertanian. Areal dipilih secara *purposive*, dengan kategori terdapat pola pemanfaatan lahan dengan sistem agroforestri atau dalam pengertian di Sumatera Barat sebagai '*parak*' yang didominasi oleh tanaman tahunan atau pohon dalam suatu bentang lahan.

Berdasar kategori di atas ditentukan tiga lokasi nagari (desa), yaitu: 1. Nagari Paninggahan, terletak di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Penggunaan lahan didominasi oleh tegal/ kebun dan hutan dalam bentuk agroforestri berbasis tanaman perkebunan (PBAF/ *plantation based agroforestry*) yang mencapai 56 persen lebih di areal Paninggahan. Tanaman perkebunan yang menempati porsi tertinggi adalah kopi robusta, kelapa, cengkeh, kemiri, kasiavera dan coklat. 2. Nagari Koto Malintang, terletak di kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Parak yang berada di sebelah atas desa berupa campuran vegetasi yang didominasi durian dan kasiavera, serta tanaman tahunan lainnya dalam suatu bentang lahan yang kompak (MPTS/ *multipurposed tree species*). 3. Nagari Paru, terletak di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. *Parak* merupakan kebun-kebun penduduk yang didominasi oleh karet dan kasiavera dalam hamparan yang luas mengelilingi Nagari Paru (RBAF/ *Rubber based agroforestry*).

Obeservasi dilakukan dengan menilai dan menggambarkan pola-pola kelembagaan lahan (*land tenure*) pada lahan komunal dan dinamika yang terjadi pada variabel kelembagaan lahan yaitu kepemilikan, akses atau pemanfaatan, dan manajemen atau kontrol pada lahan. Pendekatan ini mengacu kepada '*Rapid appraisal social forestry for land and tree tenure*' dalam menentukan *land* dan *tree tenure* (FAO, 2000).

Data primer didapat dari wawancara dan kuesioner dengan petani responden, serta wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu walinagari, ketua-ketua adat, dan ketua organisasi, sedang data sekunder berupa gambaran fisik wilayah setempat dari instansi terkait. Data meliputi keragaan *land tenure*, praktek-praktek penggunaan lahan pada agroforestri, karakteristik sosial ekonomi dan demografi rumah tangga petani, struktur dan peranan organisasi lokal.

Analisis Deskriptif untuk membangun eksplanasi terhadap keragaan dan dinamika penguasaan lahan yang meliputi kepemilikan (*ownerships*), pemanfaatan/akses (*use/access*) dan manajemen/ kontrol (*management/control*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguasaan Lahan (*land tenure*) di Sumatera Barat

Karakteristik penguasaan lahan di tiga Nagari Paru, Koto Malintang dan Paninggahan pada kategori lahan *ulayat* kaum/suku dan *ulayat* nagari tampak pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Penguasaan lahan pada *ulayat* kaum di tiga nagari

Nagari	Pemilikan/ <i>Ownership</i>	Akses/ Pemanfaatan	Kontrol
Paru	▪ Kaum/ suku	▪ Pemegang hak atas lahan yang ditunjuk ▪ Pola pemanfaatan RBAF	▪ Pemegang hak lahan ▪ <i>Mamak</i> rumah
Koto Malintang	▪ Kaum/suku	▪ Pemegang hak lahan yang ditunjuk ▪ Pola pemanfaatan MPTs	▪ Pemegang hak lahan ▪ <i>Mamak</i> rumah
Paninggahan	▪ Kaum/suku	▪ Pemegang hak lahan yang ditunjuk ▪ Pola Pemanfaatan PBAF	▪ Pemegang hak lahan ▪ <i>Mamak</i> rumah

Tabel 2. Penguasaan lahan pada *ulayat* nagari di tiga nagari

Nagari	Pemilikan/ <i>Ownership</i>	Akses/ Pemanfaatan	Kontrol
Paru	▪ Nagari	▪ Nagari ▪ Pola pemanfaatan Hutan Lindung	▪ Warga nagari
Koto Malintang	▪ Nagari	▪ Nagari ▪ Warga Nagari yang mendapat hak pengelolaan ▪ Pola pemanfaatan MPTs	▪ Nagari ▪ Warga Nagari yang mendapat hak pengelolaan
Paninggahan	▪ Nagari	▪ Warga Nagari yang mendapat hak pengelolaan ▪ Pola pemanfaatan MPTs	▪ Warga Nagari ▪ Nagari/ KAN

Pada *ulayat* kaum di Nagari Paru, bentuk pemilikan lahan ini dimiliki secara komunal dalam kaum dan suku, merupakan sebagian besar bentuk kepemilikan lahan sebagai *pusako* tinggi. Lahan diberikan oleh pimpinan suku/kaum kepada kemenakan untuk dikelola dalam bentuk kebun. Hampir semua pemegang lahan adalah sebagai penggarap. Pemilik/pemegang lahan dan pengelola (penggarap) lahan dapat berbeda suku (komunal)nya, tetapi masih pada nagari Paru.

Pada *ulayat* kaum kepemilikan lahan sebagai milik kaum, dimana lahan tidak dapat dimiliki secara perorangan. Lahan didapatkan berdasarkan warisan kepada anak perempuan. Sedangkan hak akses pada lahan juga didapatkan oleh pemegang hak/pemilik yang telah ditunjuk oleh *mamak* kepala waris untuk mengolah lahan tersebut. Lahan biasanya didapatkan setelah yang bersangkutan berumah tangga/ menikah. Kontrol pada lahan *ulayat* kaum dilakukan oleh pemilik sebagai pemegang hak pengelolaan lahan. Dimana lahan sepanjang tetap diusahakan oleh pemegang hak

milik maka dapat terus dimanfaatkan. Hal ini menggambarkan bahwa status kepemilikan pada lahan kuat dalam batas-batas dimana hubungan manusia dengan lahan terus-menerus dijaga. Hal ini menunjukkan bukti bahwa aktifitas bercocok tanam pada lahan menentukan kekuatan kepemilikannya. Kebebasan mengusahakan lahan pada *ulayat* kaum pada kondisi dimana lahan digarap dengan baik menunjukkan keberadaannya yang mirip dengan lahan-lahan perorangan dimana hak-hak yang dimiliki secara penuh pada lahan.

Sedangkan pemanfaatan lahan pada lahan *ulayat* kaum dilakukan oleh pemilik lahan yang telah mendapat hak pengelolaan dari *mamak* kepala waris. Lahan kebun/*parak*. Lahan umumnya digunakan sebagai kebun campur berupa agroforestri dengan basis tanaman utama adalah karet. Selain itu juga ditanam berbagai jenis tanaman lain seperti kasiapera, sawit, pinang, meranti, surian dan berbagai jenis tanaman pohon buah seperti mangga, sawo, melinjo, durian, rambutan dan lain sebagainya.

Pada lahan *ulayat* nagari di Paru merupakan pemilikan nagari. Lahan sebelumnya adalah merupakan lahan *ulayat* suku yang disepakati sebagai *rimbo larangan*. Lahan ini adalah milik beberapa suku, mayoritas suku Patopang dan Melayu, dan untuk kepentingan bersama disepakati sebagai pemilikan nagari. Lahan merupakan hutan yang dilindungi dari segala bentuk ekstraksi kayu oleh masyarakat nagari. Pemanfaatan lahan selain dijadikan sebagai *rimbo larangan* dengan fungsi lindung, tetapi pada lahan masih dapat dilakukan mengambil kayu yang tertekan untuk kegunaan lain seperti pagar, atau kayu bakar. Di beberapa bagian *rimbo larangan* masih dibolehkan membuka kebun karet atau tanaman lain yaitu pada tempat-tempat yang dahulunya merupakan lahan budidaya masyarakat. Sedangkan pembukaan baru sama sekali tidak dibenarkan.

Kontrol pada *ulayat* nagari dilakukan pada dasarnya oleh seluruh warga yang dinyatakan oleh Kelompok Petani Peduli Hutan (KPPH). Kelompok ini dibentuk oleh walinagari dengan fungsi pengawasan pada *rimbo larangan*, dimana anggotanya adalah *ninik mamak*, alim ulama, *cadiak* pandai, masyarakat dan pemuda.

Di Koto Malintang kepemilikan lahan *ulayat* kaum/ suku berada pada kaum/ suku sehingga pemilikan Lahan dimiliki secara komunal dalam kaum/ suku dan lahan tidak dapat dimiliki secara pribadi, dimana pengelola memperoleh hak pemanfaatan pada lahan setelah diberikan oleh *Mamak*. Lahan tidak dapat dijual atau digadaikan kepada pihak lain kecuali dalam keadaan yang sangat memaksa.

Kepemilikan lahan warisan juga didapatkan dari garis keturunan pihak ibu (matrilineal), dimana lahan diberikan oleh *mamak* kepada kemenakan biasanya setelah menikah untuk ditanami dengan tanaman multiguna dan tidak boleh dikosongkan. Pemanfaatan sesuai dengan kepentingan pengelola yang telah diberikan hak penguasaannya. Penggunaan lahan umumnya berbentuk *parak* merupakan campuran tanaman pohon dan tanaman tahunan (*agroforest*).

Kontrol lahan secara umum dilakukan oleh pemegang lahan, dimana ia dengan hak yang dimilikinya selain berupa pemanfaatan lahan juga hak untuk mengeluarkan pengguna lain pada lahan yang dipegangnya. Dengan kata lain walaupun kepemilikan lahan sebenarnya berada pada level kaum, tetapi hak memegang lahan tersebut memberi keleluasaan untuk memanfaatkan lahan sesuai dengan keinginannya.

Nagari mempunyai *ulayat* nagari berupa aset bagi nagari. Umumnya *ulayat* nagari juga dipakai dalam sistem pemanfaatan lahan berupa *parak* (agroforestri) seperti pada lahan-lahan *ulayat* kaum/ suku. *Ulayat* nagari berada di bawah

pengaturan 'kerapatan adat nagari' (KAN). KAN dapat diberikan ijin pengelolaan kepada warga nagari dengan aturan bagi hasil. Lahan dipakai anak nagari hanya berdasarkan kesepakatan tanpa kontrak tertulis, dengan sistem bagi hasil sepertiga nagari dan dua pertiga pengelola, hasil dari tanaman pangan jika ada tidak dibagi.

Di Panninggahan paada *ulayat* kaum/ suku, kepemilikan lahan berada pada kaum/ suku, sedangkan hak pemanfaatan diberikan kepada anggota kaum/ suku tersebut yang telah ditunjuk oleh *mamak tungganai*. Kepemilikan lahan diatur melalui ketentuan yang disepakati di dalam KAN. Tanah *ulayat* suku/ kaum merupakan tanggung jawab seluruh *Datuk* yang berkoordinasi dengan *Datuk Pucuk*. Pada prinsipnya lahan tidak dapat dipindahtangankan, hanya dapat diwariskan.

Lahan dapat juga dimanfaatkan oleh orang lain yang bukan anggota kaum/ suku dengan perjanjian bagi hasil. Hak-hak yang didapatkan oleh pemegang lahan adalah dapat menanam dan menanam lagi, menyewakan lahan (umumnya untuk tanaman semusim) walaupun kurang lazim, dan mewariskannya. Sedangkan lahan tidak dapat dijual kepada pihak lain.

Penggunaan lahan umumnya berbentuk kebun campuran tanaman pohon dan tanaman tahunan (*agroforest*). Penanaman kebun merupakan inisiatif dari luar bekerjasama dengan pemerintahan lokal sebagai proyek penanaman pada lahan kritis. Lahan dapat dipergunakan oleh anggota kaum/ suku yang ditunjuk oleh *mamak tungganai*. Hak-hak pada lahan *ulayat* kaum/ suku ini adalah menanam, menanam lagi, menyewakan (umumnya untuk tanaman semusim), mewariskan, tetapi lahan tidak dapat diberikan kepada pihak lain, digadaikan atau dijual. Kontrol oleh pemegang hak atas lahan, dimana ia berhak mengeluarkan pengguna lain dari lahannya sebagai konsekwensi hak pakai yang telah diberikan.

Sedangkan *ulayat* nagari berupa Enklave yang telah diakui oleh pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1891, dengan luas sekitar 1050 Ha. Kepemilikan tanah ada pada nagari, sedang hak pengelolaan diberikan kepada anggota masyarakat nagari yang ditunjuk oleh KAN. Pengelolaan ini diatur melalui ketentuan yang disepakati di dalam KAN. Pada prinsipnya lahan tidak dapat dipindahtangankan, tetapi hak pengelolannya dapat diwariskan. Tanaman yang ditanam umumnya adalah kopi, selain itu juga pemegang lahan menanam jenis-jenis seperti meranti, banio, durian, manggis dan buah-buahan lain (pohon-pohon merupakan tanaman penduduk).

Kontrol dilakukan oleh masyarakat, secara khusus ada tim pengaman peraturan nagari (Perna), yang terdiri dari: Walinagari/ Kasi Kesra, KAN, Pemuda dan Kepala *Jorong*. Kasus yang terjadi diselesaikan di tingkat nagari, jika tidak diteruskan ke berwajib/ kepolisian. Tim pengaman Perna, ketua ditunjuk, yaitu Kesra, memutuskan masalah dengan jalan musyawarah.

Gambar 1. Hubungan hak-hak privat dan komunal pada lahan *ulayat* kaum

Gambaran dari ke tiga nagari di atas menunjukkan hubungan pemegang lahan dengan lahan di bawah penguasaannya dipengaruhi oleh penguasaan yang diberikan sebagai sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan. Akibatnya hubungan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pengelolaan lahan oleh pemegang lahan yang bersangkutan. Hak-hak privat pada lahan kuat sepanjang lahan dikelola dengan baik atau ditanami dan dipelihara sesuai dengan kepentingannya. Kompleks hubungan ini dapat digambarkan pada Gambar 1.

Dinamika Penguasaan Lahan di Sumatera Barat

Jika dilihat dari pola keragaman sistem penguasaan lahan di Sumatera Barat di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem kepemilikan komunal yang berlaku merupakan suatu struktur penguasaan yang bertingkat (hirarki) (Gambar 2).

Ulayat nagari merupakan wadah untuk kepentingan bersama yang lebih diutamakan dibanding dengan *ulayat* kaum atau suku. Untuk tujuan bersama *ulayat* nagari lebih dipentingkan untuk tujuan sosial dalam rangka menjadi lembaga yang mewadahi kepentingan anak nagari yang kekuasaannya di bawah Kerapatan Nagari (KAN). Hal ini tampak dimana menurut Ter Harr (Syahyuti, 2006) *ulayat* suku atau kaum dapat berubah menjadi *ulayat* nagari jika dibutuhkan untuk kepentingan nagari.

Gambar 2. Hirarki struktur penguasaan lahan di Sumatera Barat

Begitu juga dengan *ulayat* kaum dan suku, dimana *ulayat* kaum merupakan hirarki terendah dalam *ulayat* suku yang ditunjukkan oleh kepentingan suku adalah kepentingan bersama yang lebih diutamakan dibanding kepentingan kaum. Namun pengaturan komunal ini tetap mewadahi kepemilikan secara pribadi (*private*), yang ditunjukkan oleh hak-hak penguasaan pada tumbuh-tumbuhan di atasnya yang telah mendapat perlakuan khusus atau berdasarkan karakteristik tanaman tertentu (Michon *et al.*, 1986). Dari hirarki *ulayat* tersebut maka nagari merupakan lembaga tertinggi dalam struktur adat Minangkabau, sebab pengaturan dalam sistem adat secara keseluruhan berada pada nagari.

Tidak ada kepemilikan mutlak dapat diartikan juga sebagai sifat yang *inklusif* dalam penguasaan, artinya seluruh tanah suku dapat dikuasai oleh seluruh anggota suku dengan prosedur tertentu, sementara orang dari luar suku dapat memanfaatkan

setelah memberikan upeti atau hadiah yang intinya bukan kepada nilai ekonomi tapi sebagai pengakuan hukum komunitas tersebut (Yakub, 1995).

Secara teoritis disebutkan bahwa kepemilikan dan keamanan status pohon ditentukan oleh keamanan status pada lahan. Prediksi panen yang panjang pada pohon merupakan hal yang penting untuk menentukan keamanan hak-hak penguasaan pada pohon. Akibatnya pada lahan-lahan privat dengan status keamanan hak pada lahan yang tinggi akan mendorong investasi ke lahan dalam bentuk penanaman pohon (Bruce, 1988; Otsuka *et al.*, 1997). Di Sumatera Barat dimana lahan-lahan umumnya berbentuk komunal maka status keamanan hak-hak pada lahan ini lemah (Otsuka *et al.*, 1997). Namun dalam klasifikasi penguasaan lahan ini, hubungan kekuatan ikatan antara pengelola dengan lahan ditentukan oleh tingkat manajemen pada lahan. Artinya ketika lahan dikelola dengan baik dan terus menerus maka hal ini memperkuat penguasaan pada lahan secara perorangan. Ketika lahan ditelantarkan maka kekuatan ikatan atau hak-hak perorangan pada lahan ini melemah dan digantikan oleh penguasaan secara komunal yang dikontrol oleh *penghulu-penghulu* kaum, suku atau nagari.

Dari sini dapat dikatakan walaupun status keamanan lahan-lahan komunal tetap rendah, tetapi terdapat *parak-parak* yang dikelola dengan baik (Michon *et al.*, 1986), mengindikasikan bahwa walaupun status lahan sebagai lahan komunal dengan hak-hak pemilikan yang lemah bukan hambatan bagi keberadaan hak-hak pada pohon. Hal ini juga dapat dilihat dari pendapat Syamsul Bahri (1983), bahwa dalam sistem hukum adat minangkabau ini hak-hak pada lahan berbeda dengan hak-hak terhadap tumbuhan dan bangunan di atasnya. Hak-hak pada pohon menurut Michon *et al.* (1986) tergantung pada sifat pohon, pola produksi, orang yang menanam, dan lain-lain.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan bahasan di atas, hak-hak pada lahan kuat sepanjang lahan dikelola dengan baik atau ditanami dan dipelihara sesuai dengan kepentingannya. Hak-hak pada pohon dalam sistem agroforestri di lahan *ulayat* tetap aman, walaupun kepemilikan lahan komunal mengindikasikan keamanan yang rendah.

Status keamanan lahan yang kuat bukan menjadi standar bagi investasi ke lahan dalam bentuk penanaman pohon pada agroforestri di Sumatera Barat. Status keamanan lahan justru ditentukan oleh status pengelolaan pada lahan. Semakin tinggi tingkat pengelolaan ini maka hak-hak pada lahan semakin kuat.

Hal ini berimplikasi pada kebijakan penanaman pohon pada lahan masyarakat berbasis komunal. Di Sumatera Barat ini untuk mendorong penanaman pohon yang dibutuhkan bukan penguatan status pemilikan lahan seperti misalnya sertifikasi lahan, tetapi lebih dipentingkan dukungan dalam pengelolaan lahan dan tanaman di atasnya. Input-input berupa sarana produksi lebih dibutuhkan dari pada sekedar sertifikasi lahan. Selain itu untuk mendorong penanaman pohon di lahan masyarakat ini perlu kejelasan aturan dan mekanisme pelaksanaan hak-hak menyangkut vegetasi di atasnya, khususnya penguasaan pohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruce, J.W. 1998. Review of Tenure Terminology. Tenure Brief-Land Tenure Center No.1 University of Wisconsin, Madison. www.wisc.edu

- Dias, H.U. 2003. Analysis of spatial distribution of tree Resources Outside the Forest in Ashanti Region, Ghana. *Thesis* in Int. Ins. For Geo-information Science and Earth Observation Enschede, The Netherlands
- FAO, 2000. Community Forestry Rapid Appraisal of Tree and Land Tenure. FAO Corporate Document Repository. www.fao.org
- Hayami, Y dan V.W. Ruttan. 1985. *Agriculture Development: An International Perspective*. The John Hopkins Press, Baltimore and London
- MacDicken dan Vergera. 1990. *The Clasification of Agroforestri*. . In MacDicken dan N.T. Vergera (eds). 1990. *Agroforestry: Classification and Management*. Jhon Wiley and Sons, N.Y.
- Michon, G., F. Mary dan J.M. Bompard. 1986. Multistoried agroforestry garden system in West Sumatera, Indonesia. *Agroforestry Systems* Vol 4 : 315-338
- Otsuka, K, S. Suyanto, dan T.P. Tomich. 1997. Does land Tenure Insecurity Discourage Tree Planting? Evolution of Customary Land Tenure and Agroforestry Management in Sumatera. *EPTD Discussion Paper* No. 31. IFPRI, U.S.A. www.ifpri.org
- Place, F., K.Otsuka dan S. Scherr. 2004. Collective action and Property right for sustainable developmment. Property right, Collective action and Agroforestry. Focus 11 Brief 5 of 16 Pebruari 2004. Int.Food Policy Research Institute. www.ifpri.org
- _____, K. Otsuka. 1997. Population Pressure, Land Tenure and Tree Resource Management in Uganda. *EPTD Discussion Paper* No. 24. Int. Food Police Reserch Int. www.ifpri.org
- Segura-Bonilla, O. 1997. Institutional Change and Forestry in Central America. *Paper* presented at the DRUID Workshop, Copenhagen, Denmark 8-10 Januari 1997.
- Syahyuti. 2006. Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 24 No.1 Juli 2006: 14-17
- Syamsul Bahri. 1983. *Hukum Agraria Indonesia Selayang Pandang*. Proyek Peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Andalas, 1982-1983
- Unruh Jon D. 2001. Viewpoint Poverty and property rights in the developing world: not as simple as we would like. *Land Use Policy* 19 (2002) 275-276
- Yakub, B.N. 1995. *Hukum Kekerabatan Minangkabau*. CV. Pustaka Indonesia, Jakarta